

PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015-2019

Prof. Muhammad Firdaus, Ph.D



Fakultas Pertanian Universitas Jambi
31 Januari 2015

OUTLINE

- 1. Kondisi Umum Sektor Pertanian Indonesia**
- 2. Review Kebijakan Pertanian: Ketahanan, Kemandirian, Kedaulatan Pangan dan Fiskal**
- 3. Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019**

Kondisi Umum Sektor Pertanian

PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Sektor Pertanian (Rp Milliar), 2000-2013

Lapangan Usaha	2000	2005	2010	2013**	%
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	216 831,5	253 881,7	304 777,1	339 890,2	
a. Tanaman Bahan Makanan	112 355,6	125 801,8	151 500,7	161 969,5	47,65
b. Tanaman Perkebunan	32 491,4	39 810,9	47 150,6	54 903,0	16,15
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	25 230,9	32 346,5	38 214,4	43 914,0	12,92
d. Kehutanan	16 343,0	17 176,9	17 249,6	17 442,5	5,13
e. Perikanan	30 410,6	38 745,6	50 661,8	61 661,2	18,14
	216 831,5	253 881,7	304 777,1	339 890,2	100,00
PRODUK DOMESTIK BRUTO	1 389 769,9	1 750 815,2	2 314 458,8	2 770 345,1	
% Pertanian terhadap PDB	15,6	14,5	13,2	12,3	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

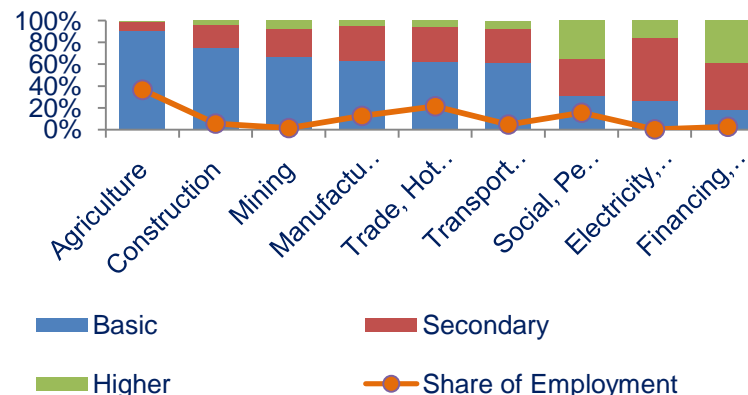
Kondisi Umum Sektor Pertanian

Small Size Farm

Luas Lahan (m ²)	2003	2013
< 1.000	9.380.300	4.338.847
1.000 – 1.999	3.602.348	3.550.185
2.000 – 4.999	6.816.943	6.773.364
5.000 – 9.999	4.782.812	4.555.075
10.000 – 19.999	3.661.529	3.725.865
20.000 – 29.999	1.678.356	1.623.434
> 30.000	1.309.896	1.608.699
Total	31.232.184	26.175.469

Sumber : Sensus Pertanian, 2014

Low Education



Statistik Ekspor-Impor Pertanian, 2013

Sub Sektor	Impor		Ekspor	
	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)
Tanaman Pangan	13.107.786.052	5.436.246.112	331.741.209	165.837.455
Hortikultura	1.638.305.484	1.618.930.879	374.863.822	439.743.215
Tanaman Perkebunan	1.492.990.535	2.660.871.849	32.540.284.697	29.499.879.006
Peternakan	1.244.993.929	3.019.311.454	196.300.265	568.243.712
Total	17.484.076.000	12.735.360.294	33.443.189.993	30.673.703.388

Kondisi Umum Sektor Pertanian

1. Untuk perkebunan, perkembangan berbeda selama 10 tahun terakhir: sawit (fast growth); kakao (fast); cengkeh, tembakau, tebu (recovery); kopi, karet, kelapa, mete (constant); teh, lada (slow down)
2. Penguasaan lahan: perkebunan besar negara (6%), perkebunan besar swasta (21%) dan perkebunan rakyat (72%)
3. Sumber penerimaan negara: konidisi 2013 - cukai rokok (95 T); pajak ekspor (31,7 T) dan bea masuk (27,1 T)



Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

UU 18/2012: Pangan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan
Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan

Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

UU 18/2012: Pangan

Pasal 1 (2)

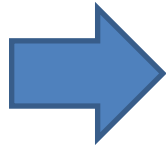
Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara *mandiri* menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan *hak bagi masyarakat* untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan *potensi sumber daya lokal*

Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

UU 18/2012: Pangan

Pasal 1 (3)

Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat



PAJALE

Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

UU 18/2012: Pangan

Pasal 1 (4)

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

Pandangan FAO terhadap Ketahanan Pangan

At national level, food security can be enhanced by increased national production **and increased imports**

High food import trends need not be a negative development when associated with increased ability to pay for imports through export earnings

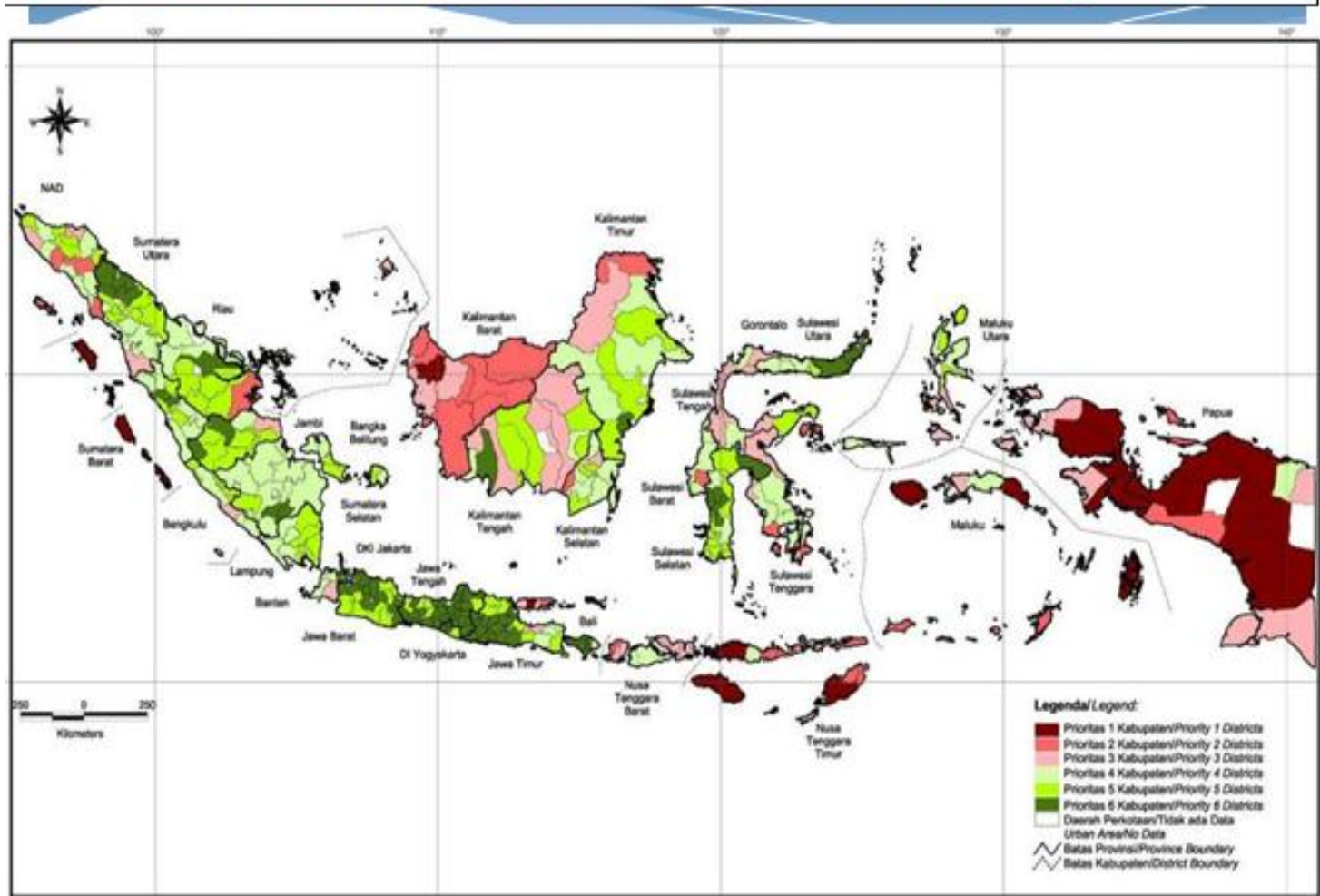
Pandangan Akademisi terhadap Ketahanan Pangan

Food Security is an important social objective. Relying on international food market to meet the needs of Indonesia's growing population is **PRECARIOUS** (Warr, 2011)

Moreover: the policy of restricting food imports reduces the FS of poor net consumers. Strategies: increase agricultural productivity and systems of cash-transfers

Situasi Ketahanan Pangan

Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan

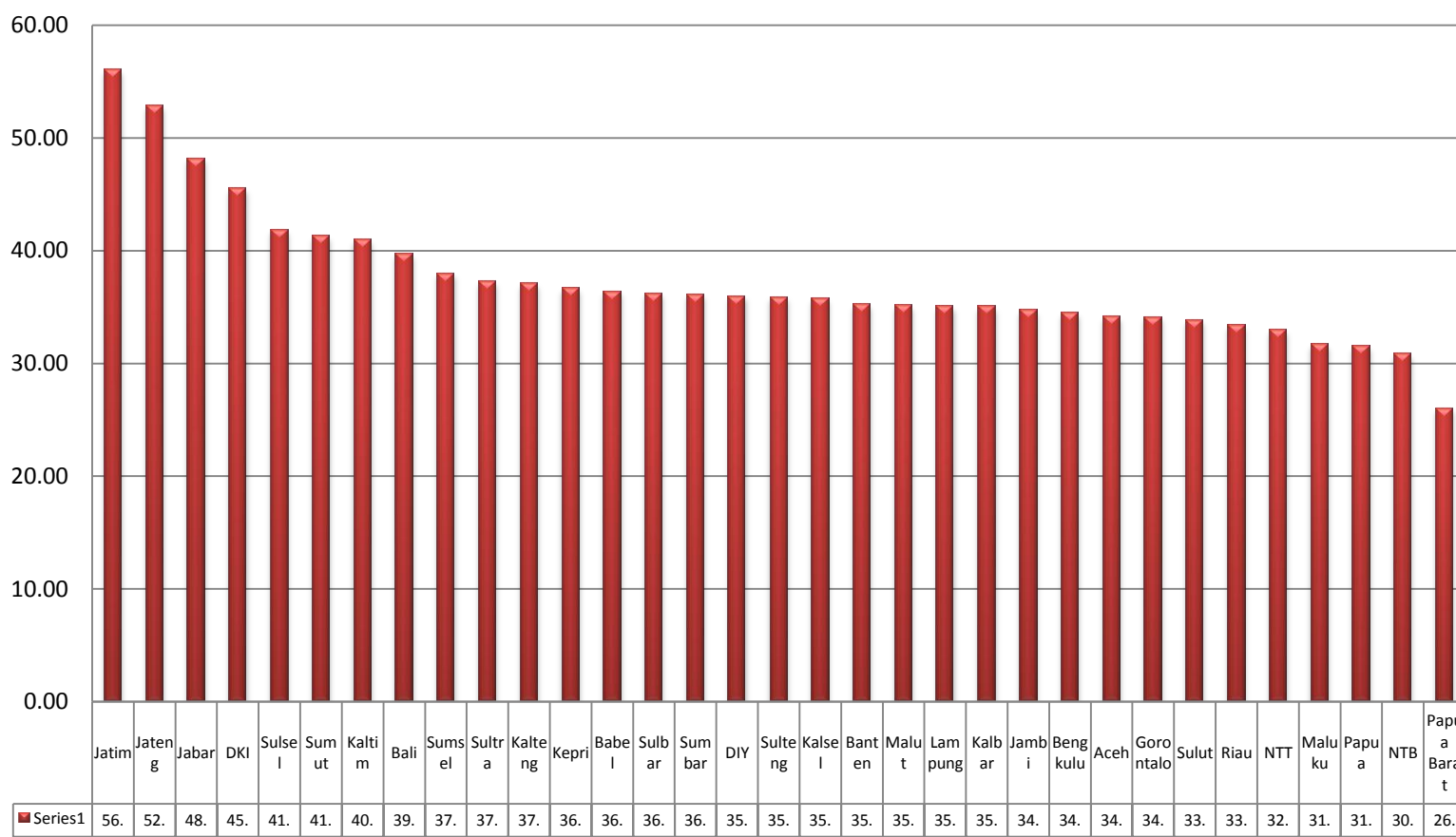


Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

Indikator Ketahanan Pangan			
Availability		Affordability	
1	Jumlah Penduduk	1	PDRB
2	Total Produksi Pertanian (tanaman pangan)	2	PDRB per Kapita
3	Prosentase APBD Pertanian thdp PDRB	3	Penyaluran Raskin/Jumlah Penduduk
4	Jumlah Migrasi (penduduk keluar desa)	4	Pertumbuhan Raskin
5	Luas panen untuk tanaman pangan	5	Realisasi KUR
6	Perbandingan jumlah gudang per luas wilayah	6	Rata - Rata Pengeluaran Untuk Makanan
7	Perbandingan panjang jalan thd luas wilayah	7	Pengeluaran makanan thdp total pengeluaran
8	Konsumsi beras per kapita	8	Indeks Kedalaman Kemiskinan
9	Total Factor Productivity	9	Persentase penduduk miskin thd jumlah penduduk
10	APBD Sektor Pertanian	10	Jumlah Gizi Balita Buruk
Quality and Safety			
1	Standar deviasi total produksi pertanian (volatilitas produksi)		
2	Rata - Rata Konsumsi Protein		
3	Akses Air Bersih		
4	Human Development Index		
5	Inflasi bahan makanan		

Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan - Total



Sumber: Bank Indonesia, 2014

Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

UU 18/2012: Pangan

Pasal 15

Pemerintah mengutamakan **Produksi Pangan dalam negeri** untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan

Pasal 18

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban: d. **melakukan pengalokasian anggaran**

Pasal 23

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan **Cadangan Pangan Nasional**

Pasal 34

Ekspor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi Pangan Pokok dan Cadangan Pangan Nasional

Pasal 36

Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri

Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

UU 19/2013: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT IPB

Website : <http://www.fem.ipb.ac.id>

Member of
AACSB
INTERNATIONAL

Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

UU 19/2013: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 15

- (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan **produksi Pertanian dalam negeri** untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional
- (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui **pengaturan impor** Komoditas Pertanian

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola **prasarana Pertanian**
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

UU 19/2013: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 19

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan **sarana produksi Pertanian**

(2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
- b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi

Pasal 21

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat **memberikan subsidi** benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, **pupuk**, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah

Review Kebijakan: Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

UU 19/2013: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 22

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- b. memberikan **jaminan pemasaran** hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;
- c. memberikan **keringanan Pajak Bumi dan Bangunan** bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan **fasilitas pendukung pasar** hasil Pertanian.

Pasal 33

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan **bantuan ganti rugi gagal panen** akibat kejadian luar biasa

Pasal 38

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan **Asuransi Pertanian**

Review Kebijakan Fiskal Pertanian

TA 2014

- **Subsidi non-energi:** Rp 52,7 T (15,5%): pangan (18,2 T untuk 15,5 jt RT); pupuk (Rp 21 T); benih (Rp 1,6 T); bunga kredit program (Rp 3,2 T)
- **Kementan:** Rp 13,6 T untuk 6: ditambah diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan **KKP:** Rp 5,7 T untuk 5: idem 2013
- **Sasaran prioritas:** peningkatan produksi padi sebesar 6,25% (76,6 juta ton GKG); pertumbuhan produksi jagung 10,0%; Kedele (20,0%); tebu (12,6%); dan daging sapi (7,3%); peningkatan produksi perikanan menjadi 22,4 juta ton (tangkap 5,5 juta ton dan budidaya 16,9 juta ton; peningkatan NTP dan NTN di atas 105; rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan pemeliharaan pada areal 3.023,8 ribu ha

Review Kebijakan Fiskal Pertanian

TA 2015

- **Subsidi non-energi:** Rp 69,98 T (16,0%): pangan (18,94 T); pupuk (Rp 35,7 T); benih (Rp 0,94 T); bunga kredit program (Rp 2,48 T)
- **Kementan:** Rp 15,8 T dan **KKP:** Rp 6,4 T
- **Sasaran Prioritas:** Kementan 10 plus Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan; Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
KKP 8: plus Pengawasan SD Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Review Kebijakan Subsidi Pupuk

- Masih terdapat permasalahan dalam pencapaian 6T: jumlah, jenis, waktu, mutu, **harga** dan lokasi. Titik permasalahan utama adalah sistem dan kelembagaan distribusi
- Perdebatan tentang subsidi pupuk berujung pada pertanyaan apakah subsidi dilakukan melalui produsen atau langsung ke petani. Subsidi langsung dianggap lebih baik, dengan cara memberikan petani **uang tunai atau kupon atau kartu subsidi**; yang ditransfer ke akun milik petani. Implementasi rencana ini akan dapat menghilangkan *market dualism*
- Tantangan ke depan dalam program subsidi pupuk adalah “**meningkatkan HET**”. Gap antara biaya produksi dan pemasaran pupuk meningkat (tahun 2012: 50%)

Review Kebijakan Subsidi Pupuk

Dirjen Sarana dan Prasarana:

Dengan meningkatkan HET, akan terdapat tabungan yang dapat dialokasikan untuk program lain. Terdapat 3 alternatif program yaitu: mendukung implementasi asuransi pertanian, subsidi harga gabah serta perbaikan infrastruktur. Jika diasumsikan mulai 2015 alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 28 T per tahun, maka peningkatan HET secara bertahap akan memberikan alokasi seperti tabel berikut

Rencana Program Subsidi Sektor Pertanian Indonesia, 2015-2018

No.		Jumlah (Rp milyar)			
		2015	2016	2017	2018
1.	Asuransi Pertanian	2,320.01	2,320.01	2,320.01	2,320.01
2.	Subsidi Harga Gabah	-	2,295.57	4,137.27	8,211.23
3.	Infrastruktur Pertanian	-	2,295.57	4,137.27	8,211.23
Total		2,320.01	6,911.15	10,594.55	18,742.47

Sumber : Dirjen Sarana dan Prasarana, 2014

Review Kebijakan Subsidi Pupuk

Osorio, et al. (2011):

There is an array of options for using newly freed resources, as fertilizer is just one of many determinants of yields and agriculture productivity that complement, but do not substitute, investments in: irrigation, extension services, improved agriculture marketing (particularly in the outer islands off-Java) and research and development in agriculture

Who Is Benefiting from Fertilizer Subsidies in Indonesia?

Camilo Gomez Osorio
Dwi Endah Abriningrum
Enrique Blanco Armas
Muhammad Firdaus

more prominent in smaller farmers. Figure 4.1 illustrates graphically the results from Table 4.2 and shows how beyond a certain point increasing the use of fertilizer has an adverse effect on yields.

Figure 4.1 Urea and rice yields in 2007 –2SLS model estimation

Rice yields (kg/ha)

Actual urea use (kg/ha)

2SLS Model Estimation

Source: World Bank staff calculations.

Review Kebijakan Subsidi Benih

- Alokasi subsidi benih berfluktuasi selama 10 tahun terakhir. Kebijakan subsidi benih juga sangat dinamis. Sejak dikeluarkannya Permentan No 67 bulan Juni 2013, maka subsidi dengan pola **BLBU** yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya ditiadakan. Mekanisme subsidi **diganti dengan subsidi harga melalui produsen benih**. Pemerintah memberikan subsidi melalui produsen benih yang berstatus sebagai pelaksana *Public Service Organization* (PT Sang Hyang Sri dan PT Pertani) sebesar masing-masing untuk padi inbrida, padi hibrida, jagung komposit dan jagung hibrida sebesar 75%, 91%, 77% dan 50% dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
- Pola subsidi ini mirip dengan subsidi pupuk yang sudah dilaksanakan puluhan tahun. Sasaran 6 T, terutama tepat **waktu dan mutu** tidak dapat sepenuhnya dicapai karena berbagai permasalahan di lapangan

Review Kebijakan Subsidi Benih

- Pada sistem usahatani, seperti padi dan jagung, benih merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa pada usahatani padi dan jagung di Indonesia: **benih memiliki elastisitas produksi lebih besar dibandingkan dengan pupuk baik pupuk nitrogen, phospor maupun kalium.**

Sumber: Kusnadi (2011) menemukan elastisitas produksi untuk benih padi dengan pendekatan maximum likelihood sebesar 0,035; untuk pupuk nitrogen, phospor maupun kalium masing-masing sebesar 0,014; 0,004 dan - 0,0002. Untuk jagung, elastisitas produksi benih yang diperoleh sebesar 0,125; sedangkan pupuk nitrogen dan phospor, masing-masing sebesar 0,038 dan 0,028 (Setyanto, 2008). Dengan menggunakan data nasional, Kariyasa dan Sinaga (2004) menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri prioritas kebijakan pemerintah adalah memperbaiki teknologi produksi, yaitu mengajarkan petani untuk menggunakan benih yang bermutu.

- Dengan menggunakan asumsi rata-rata harga eceran tertinggi semua jenis, nilai pasar benih padi dan jagung per tahun tidak kurang dari Rp 10 triliun untuk benih padi dan Rp 1 triliun untuk benih jagung

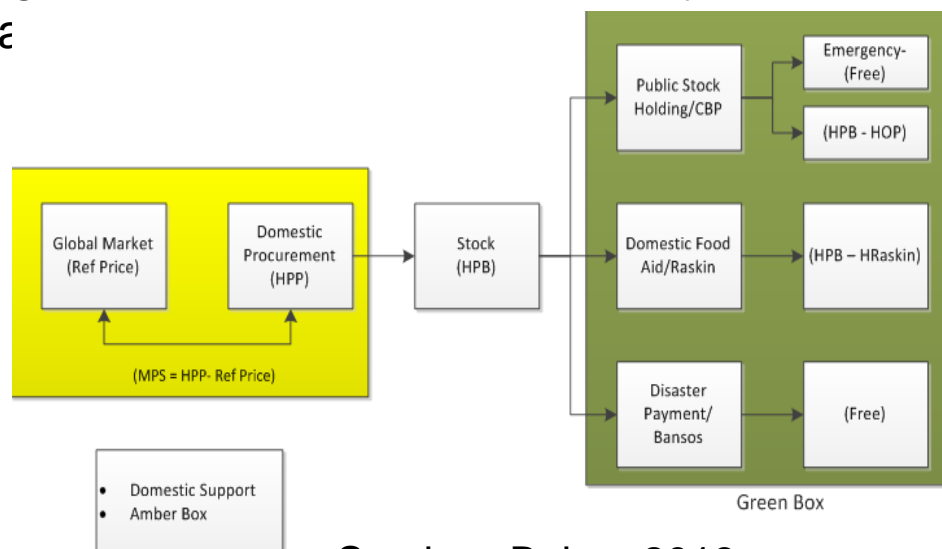
Solusi alternatif:

- ◉ Pemberdayaan Penangkar Benih/Asosiasi Bank Benih Petani Indonesia
- ◉ Akses benih dasar dan benih pokok oleh perusahaan swasta

Review Kebijakan Subsidi Harga Output

- Kebijakan yang terkait dengan harga output adalah Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah/beras, baik di tingkat petani maupun penggilingan. Kebijakan HPP dilaksanakan perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan beras untuk Masyarakat Miskin dan Cadangan Beras Pemerintah.
- Pro kontra terhadap besaran HPP: perlu dinaikkan agar tidak terjadi penekanan terhadap harga gabah petani, namun tidak menyebabkan naiknya angka inflasi secara

- **Isu strategis:**
Public Stock Holding menjadi isu penting dalam WTO yang dibahas sebagai *interim solution* pada MC-9 di Bali



Sumber: Bulog, 2013

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

RT RPJMN 2015-2019

- Sasaran Share PDB Pertanian: 15% th 2015 dan 14% th 2019
- Agenda:
 - Penguatan setor primer** untuk meningkatkan produksi dan menyiapkan komoditi primer sebagai bahan baku industri melalui **1. Peningkatan Agroindustri**: Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat; Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati; Pengembangan agroindustri perdesaan; Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran; Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar; Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif . **2.Peningkatan Hasil Perikanan**: Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan; Peningkatan kualitas sarana prasarana perikanan; Penyempurnaan Kelembagaan; Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. **3: Peningkatan Hasil Hutan Dan Kayu**: Meningkatkan tata kelola kehutanan; Peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan; Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu .

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

RT RPJMN 2015-2019

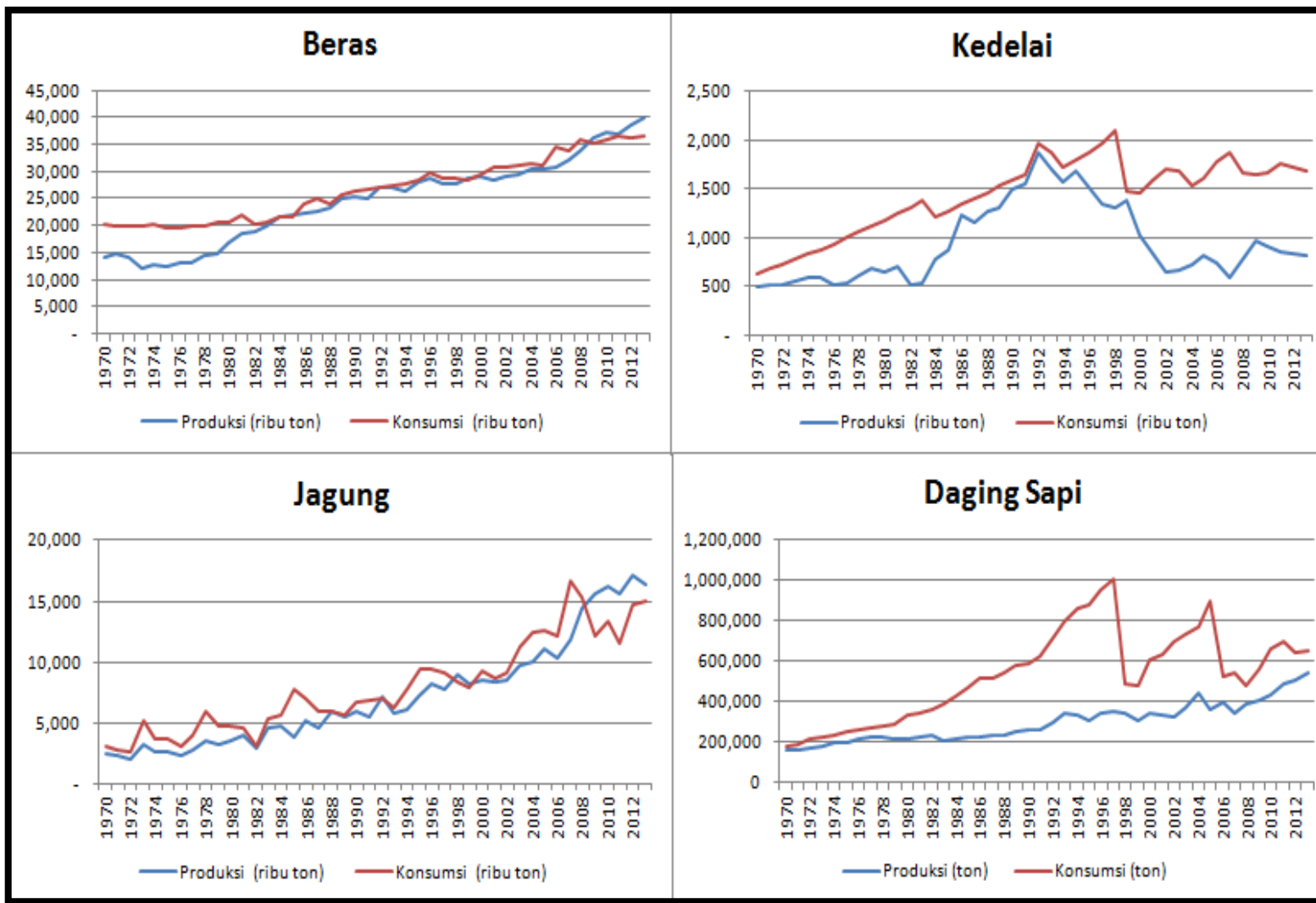
Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi dan Air untuk mencapai ketahanan pangan nasional melalui **1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri** (Padi: mengamankan lahan beririgasi teknis; revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan; pendayagunaan swasta/BUMN melalui GP3K; pasca panen. Pangan lain : gula, sapi, jagung, KEDELE, cabai, bawang. Produksi Perikanan: ekstensifikasi/intensifikasi usaha perikanan; input; kemandirian produk dan kesejahteraan. **2. Peningkatan kualitas distribusi dan akses pangan** (cadangan pangan beras, KEDELE dan gula; penguatan BULOG/BUMN Pangan; harmonisasi kebijakan impor). **3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi.** **4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.** **5. Peningkatan layanan jaringan irigasi** (rehabilitasi, partisipasi petani, SRI, water reuse). **6. Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan**

TRENDING TOPIC

1. PAJALE

2. EKSPOR PERTANIAN NAIK 3X LIPAT
PADA 2019

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019



Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

Komoditi	Tahun	Model Terbaik		Keterangan
		Produksi	Konsumsi	
Beras	2014	40319.7	37077.0	Potensi tercapai swasembada
	2015	40959.1	37499.3	Potensi tercapai swasembada
	2016	41533.1	37922.0	Potensi tercapai swasembada
	2017	42133.7	38344.7	Potensi tercapai swasembada
	2018	42723.5	38767.3	Potensi tercapai swasembada
Jagung	2014	17458.0	14602.0	Potensi tercapai swasembada
	2015	18029.0	14745.0	Potensi tercapai swasembada
	2016	18600.0	14909.0	Potensi tercapai swasembada
	2017	19171.0	15136.0	Potensi tercapai swasembada
	2018	19742.0	15391.0	Potensi tercapai swasembada
KEDELE	2014	803.0	1697.0	Swasembada belum tercapai
	2015	803.0	1780.0	Swasembada belum tercapai
	2016	803.0	1797.0	Swasembada belum tercapai
	2017	803.0	1815.0	Swasembada belum tercapai
	2018	803.0	1844.0	Swasembada belum tercapai
Daging Sapi	2014	546462.0	652363.0	Swasembada belum tercapai
	2015	559045.0	652363.0	Swasembada belum tercapai
	2016	571628.0	652363.0	Swasembada belum tercapai
	2017	584212.0	652363.0	Swasembada belum tercapai
	2018	596795.0	652363.0	Swasembada belum tercapai

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

Lesson Learned

Warr, 2011:

*Food security is an important social objective. Relying on international food markets to meet the needs of Indonesia's growing population is precarious. A preferable strategy for raising self-sufficiency is to **promote improved agricultural productivity**. This reduces imports by raising agricultural output but does so without raising the domestic price of food and so without creating a conflict between the goals of higher levels of self-sufficiency on the one hand and food security and poverty reduction on the other*

Dampak makro peningkatan produktivitas pangan:

Variabel	Perubahan (%)
Neraca Pembayaran	3,85
PDB	0,91
Ekspor	10,20
Impor	-5,72
IHK	-6,21

Sumber: Haryono, 2008 (CGE-AGRINDO)

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

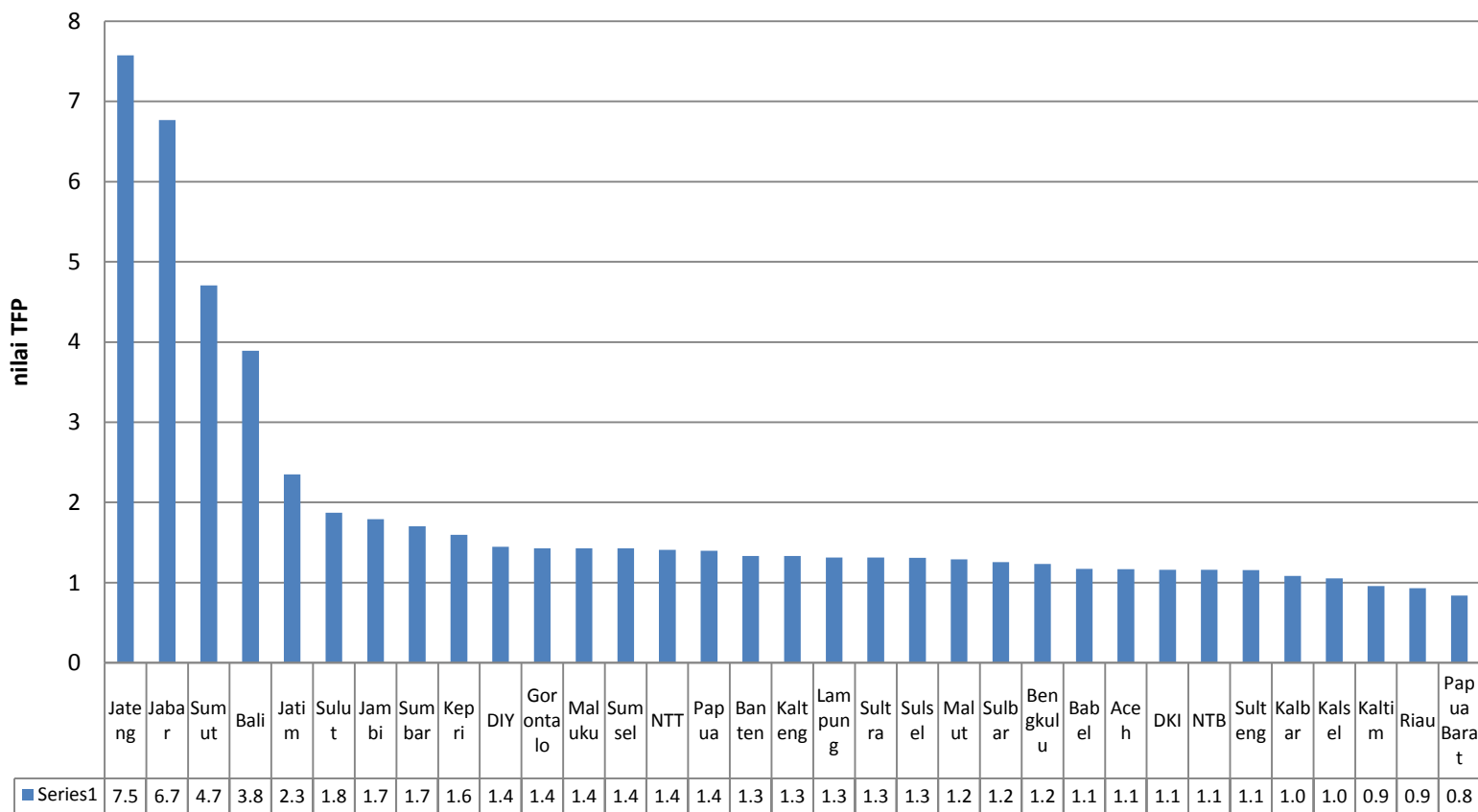
Lesson Learned

1. **India:** peningkatan produktivitas pertanian karena dukungan negara terhadap kredit pertanian, irigasi dan faktor produksi
2. **Vietnam:** peningkatan produktivitas pangan karena irigasi, brigade OPT, perbaikan mekanisasi serta penggunaan pupuk organik yang dapat meningkatkan rendemen gabah sampai 75%
3. **Indonesia:** kontribusi produktivitas pada kenaikan produksi padi sekitar 56%; luas panen sekitar 26% dan sisanya interaksi keduanya. Berbagai program subsidi serta teknis: Gema Palagung, P2BN/SLPTT, GP3K/Food Estate perlu dilaksanakan secara konsisten dan **massal**

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

Produktivitas Pertanian antar Daerah

Hasil Perhitungan TFP 2007 - 2013



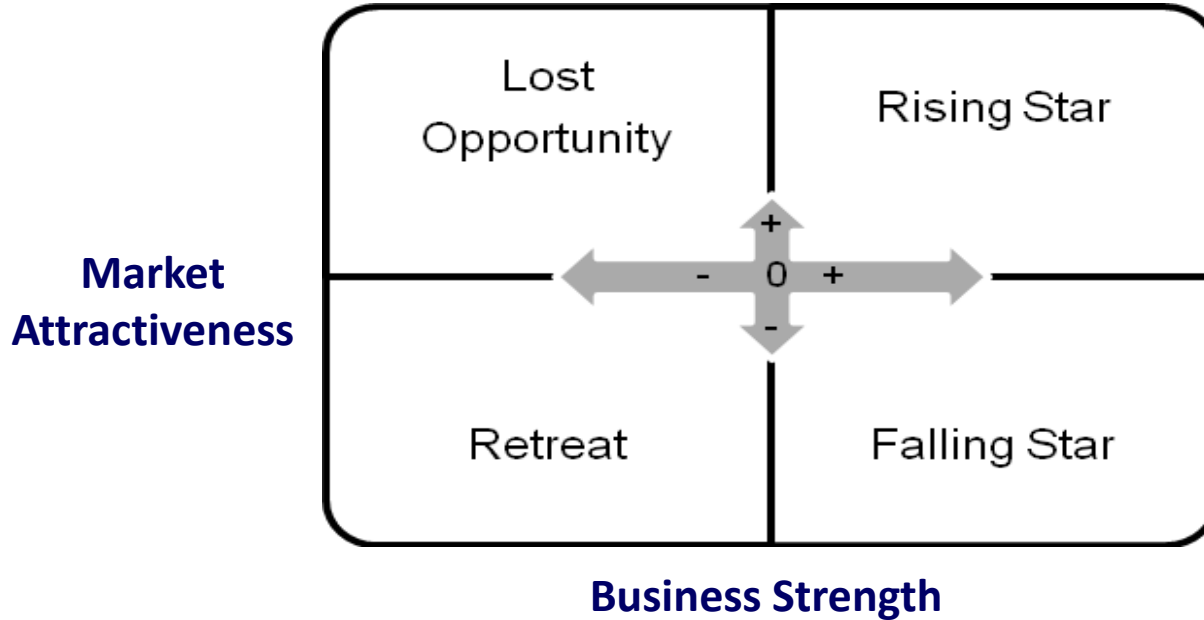
Sumber: Bank Indonesia, 2014

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT IPB

Website : <http://www.fem.ipb.ac.id>



Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019



**Diagram Export Product Dynamics (EPD)
(Esterhuizen dan Royen , 2007)**

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

RINGKASAN EPD UNTUK KOMODITAS **KUBIS** DI PASAR ASEAN, 2002-2012

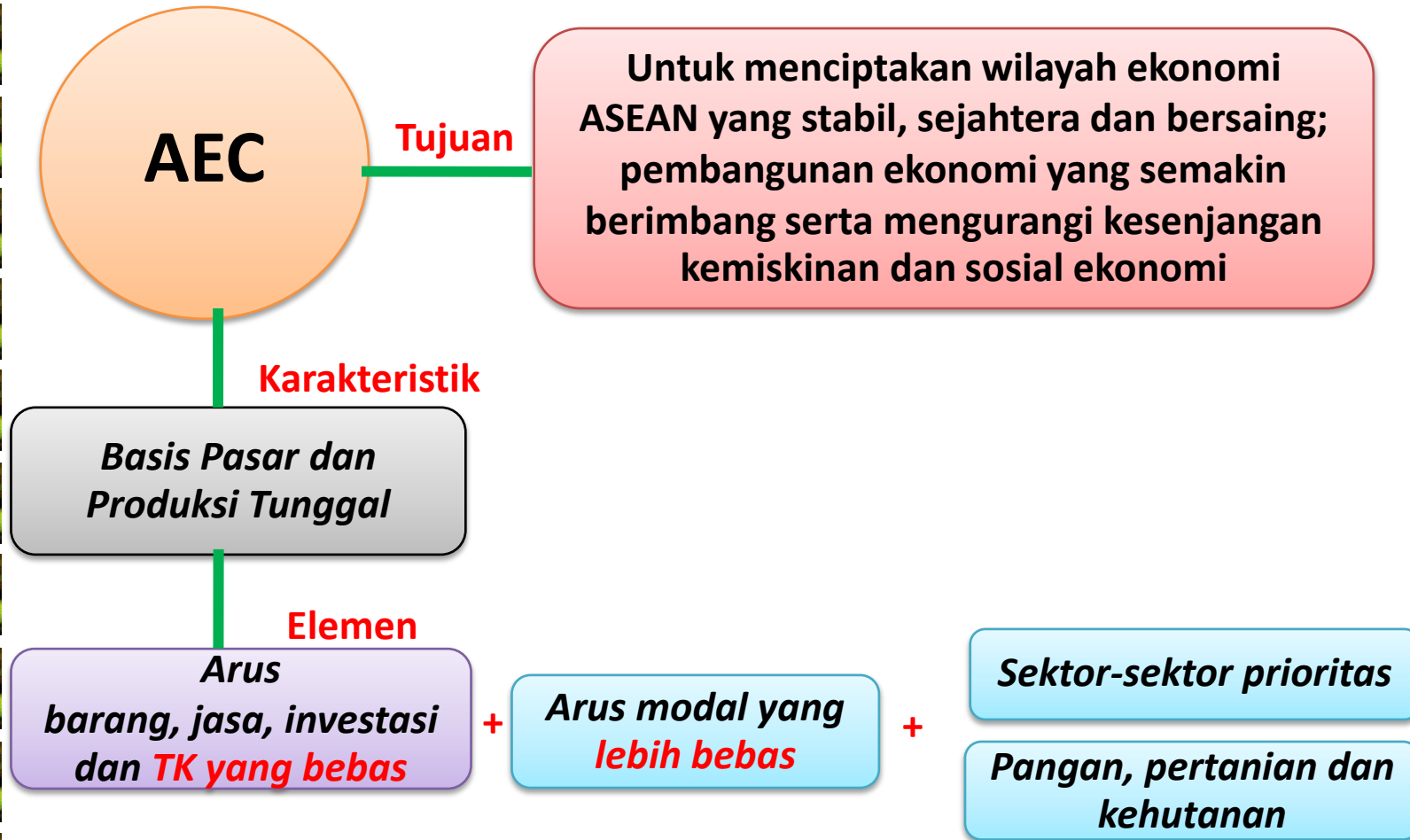
Negara Asal (Diurut dari yang Terbesar)	Negara Tujuan (Diurut dari yang Terbesar)			
	Singapore	Malaysia	Indonesia	Vietnam
Indonesia	Retreat	Lost Opportunity	-	Rising Star
Malaysia	Falling Star	-	Falling Star	Falling Star
Singapore	-	Retreat	-	Falling Star
Thailand	Rising Star	Rising Star	Falling Star	Lost Opportunity

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

RINGKASAN EPD UNTUK 4 KOMODITAS DI PASAR ASEAN, 2002-2012

Komoditas	Negara Tujuan (Diurut dari yang Terbesar)			
	Singapore	Malaysia	Vietnam	Thailand
Kentang	Retreat	Lost Opportunity	-	-
<i>Chilli</i>	Lost Opportunity	-	Retreat	Rising Star
Tnm Hias	Rising Star	Rising Star	Falling Star	-
Tnm Biofarmaka	Lost Opportunity	Lost Opportuniy	Retreat	Retreat

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019



Tujuan , Karakteristik dan Elemen AEC

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

Rencana Aksi AEC untuk Pertanian

Kegiatan

Tahun

Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu produk perikanan a.l. Melalui HACCP

2008-2009

Standar legalitas kayu dan sertifikasi hutan

2009

Harmonisasi batas-batas residu Maksimum (MRLs) untuk pestisida yang umum digunakan

2010

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

Rencana Aksi AEC untuk Pertanian

Kegiatan

Tahun

Harmonisasi prosedur *sampling* dan inspeksi Karantina

2010-2011

Pengembangan ASEAN GAP, GAHP, GMP, GHP, HACCP

2012

Penerapan SPS

2015

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

Rencana Aksi AEC untuk Pertanian

Kegiatan

Tahun

Harmonisasi peraturan pengembangan produk pertanian dengan bioteknologi modern

2015

Harmonisasi standar kualitas dan keamanan produk **hortikultura** dan produk pertanian penting

2015

Harmonisasi standar manajemen *bio-security* untuk pengendalian kesehatan hewan

2015

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

Rencana Aksi AEC untuk Pertanian

Kegiatan

Tahun

Pengembangan kerjasama dengan
WTO, FAO, OIE, IPPC, CODEX, CI
TES

2008-2015

Pengembangan kerjasama riset
dan transfer teknologi

2008-2015

Pengembangan kerjasama dengan
swasta untuk keamanan pangan,
investasi, akses pasar dll.

2008-2015

Pencegahan *illegal logging*
dan *illegal fishing*

2008-2015

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

Rencana Aksi AEC untuk Pertanian

Kegiatan

Tahun

Pengembangan kerjasama dengan
WTO, FAO, OIE, IPPC, CODEX, CI
TES

2008-2015

Pengembangan kerjasama riset
dan transfer teknologi

2008-2015

Pengembangan kerjasama dengan
swasta untuk keamanan
pangan, investasi, akses pasar dll.

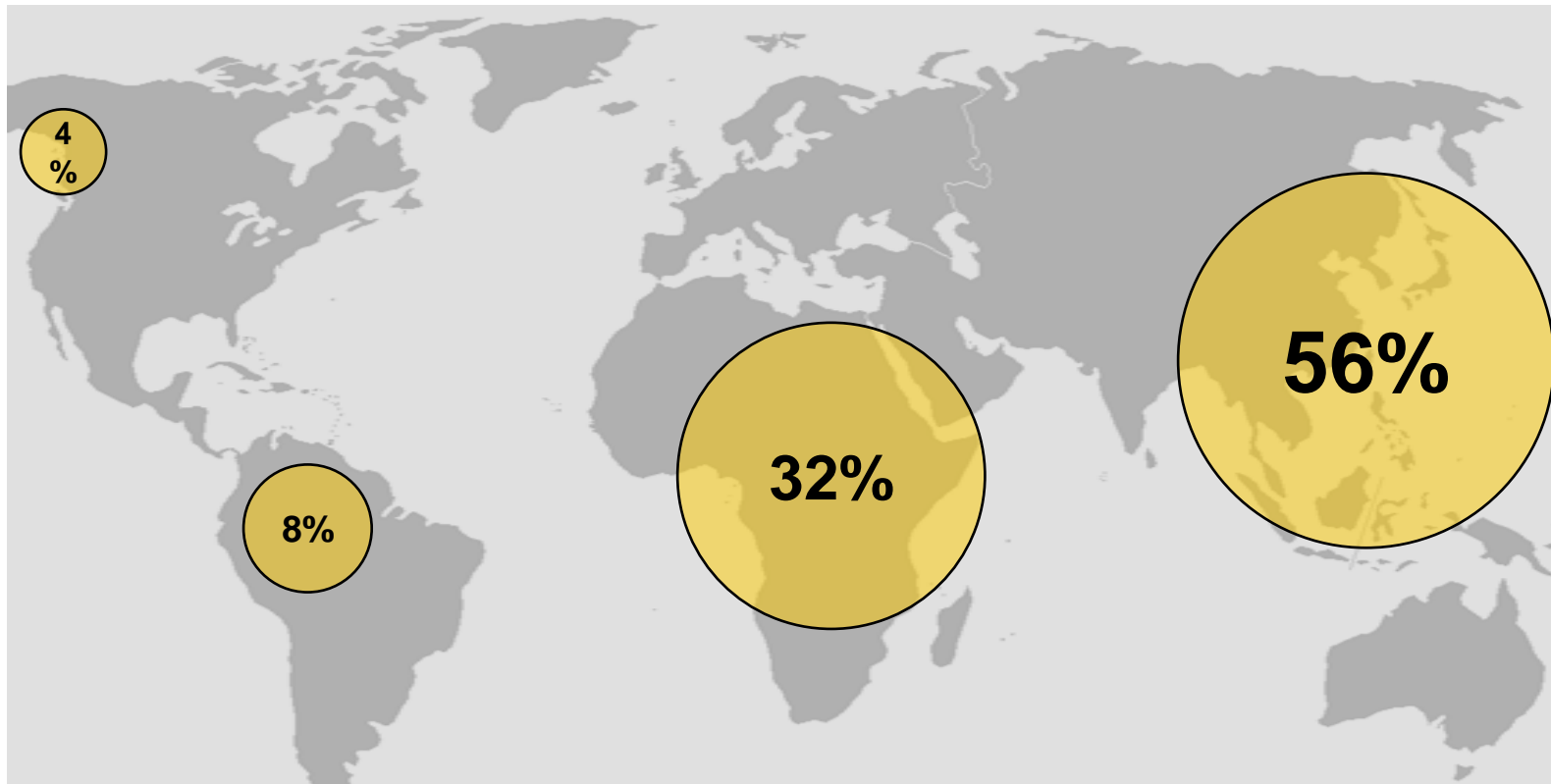
2008-2015

Pencegahan *illegal logging*
dan *illegal fishing*

2008-2015

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

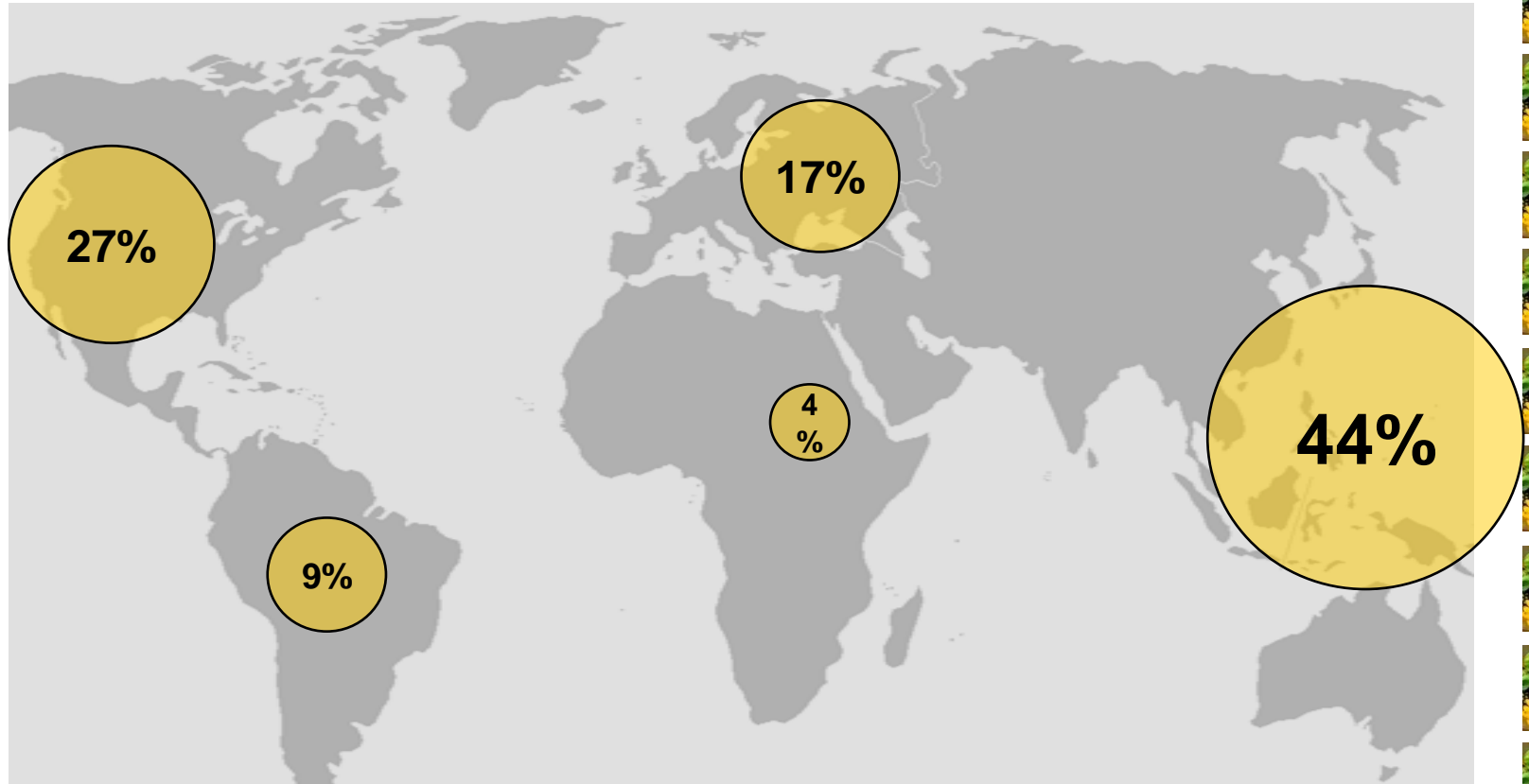
Population Distribution in 2025



Source: 21st Century Beef Club

Paradigma Pembangunan Pertanian 2015-2019

Economic Growth Distribution in 2025



Source: 21st Century Beef Club

Rekomendasi Kebijakan

- Brazil, China dan Afzel: fokus kebijakan pertanian a.l. pada infrastruktur perdesaan; kredit pertanian; kebijakan pajak dan akses pasar LN. Untuk Indonesia perlu perubahan sistem subsidi terutama Raskin dan Pupuk ke subsidi langsung. Investasi pertanian juga dipermudah (OECD Review)
- Perlu peningkatan alokasi anggaran pertanian untuk irigasi, akses pasar, revitalisasi penyuluhan dan perbenihan
- Mempertimbangkan iKerangka Regulasi saat ini, maka perlu dipikirkan secara serius alokasi anggaran a.l. untuk prasarana pertanian lain (jalan desa) serta untuk penjaminan pasar dan asuransi pertanian
- Perlu terobosan untuk peningkatan akses terhadap pasar luar negeri yang berorientasi kesejahteraan petani

hatur nuhun...



**FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN IPB
DARMAGA - BOGOR, TELP: 0251-8626520
Website - <http://www.fem.ipb.ac.id>**